



KUALITAS HIDUP SEJAHTERA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN RAYA MAGELANG YOGYAKARTA KM 5-8 PASCA RELOKASI KE *PKL MERTOYUDAN CORNER*

Nur Ranika Widyaningrum[✉], Eko Handoyo

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Keywords:

Quality Of Life, Relocation, PKL Mertoyudan Corner

Abstrak

Keberadaan PKL di sepanjang Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8 menyebabkan berbagai permasalahan seperti terganggunya kelancaran, ketertiban, keindahan dan kebersihan jalan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan kebijakan melalui Perda No 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Implementasi dari Perda tersebut adalah relokasi PKL di sepanjang Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8 ke *PKL Mertoyudan Corner*. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan kualitas hidup sejahtera PKL pasca relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kualitas hidup sejahtera PKL pasca relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari 12 informan yaitu PKL di *PKL Mertoyudan Corner*, pedagang yang pindah dari *PKL Mertoyudan Corner* serta pihak Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) PKL di Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8 sebagian besar menunjukkan respons yang positif terhadap relokasi, yaitu dalam bentuk penerimaan dan persetujuan, sedangkan 24 atau 40% diantara 60 PKL yang di relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner* memutuskan pindah; (2) kualitas hidup sejahtera PKL yang diukur dari aspek penghasilan, pemenuhan kebutuhan material, derajat dipenuhinya kebutuhan hayati, kebutuhan manusiawi dan kebebasan memilih menunjukkan penurunan. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah agar dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Kabupaten Magelang dan dinas terkait mengeluarkan program yang lebih efektif baik dalam pemilihan tempat relokasi maupun pembuatan desain penataan PKL. Pemerintah Kabupaten Magelang dan Dinas terkait harus melakukan koordinasi yang baik dan melakukan promosi untuk memperkenalkan dan meningkatkan minat pengunjung terhadap *PKL Mertoyudan Corner*. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan fasilitas yang mempermudah konsumen seperti tidak ada pungutan biaya parkir dan memberikan fasilitas yang mendukung kegiatan usaha PKL.

Abstract

The existences of street vendors along Magelang-Yogyakarta KM 5-8 Street bring out many problems such as the disturbance of deliverance, arrangement, beauty, and cleanliness of the street. In order to solve that problems, the government of Magelang regency issues a policy through Perda No 7 Tahun 2009 about PKL allocation and empowerment. The implementation of the regional regulation is relocation the street vendors from Magelang-Yogyakarta KM 5-8 Street to PKL Mertoyudan Corner. The researcher is interested in study related to street vendors' life prosperity quality after the relocation. The type of this study is Qualitative Study. Researcher asked 12 street vendors in Mertoyudan Corner, street vendors who move from Mertoyudan Corner, and also the employee of Department of Trade and Market to collect the information as the data source. Interview, observation and documentation are the techniques that were used by the researcher. The result of this study shows: (1) Most of the street vendors in Magelang-Yogyakarta KM 5-8 Street give the positive responses like acceptances and approval toward the relocation, while 24 or 40% among 60 street vendors decide to move from there; (2) the street vendors' life prosperity is measured by their income and fulfilling the necessities of life, the degree of biological needs, human needs, and freedom of choosing to show a reduction. The suggestion that come up from this study in order to arrange and empower the street vendors, the government of Magelang regency and related government publish the program that more effective whether in selecting the relocation place or designing of street vendors arrangement. The government of Magelang regency and related government have to make a better coordination and promotion to introduce and increase the visitors' interest toward street vendors in PKL Mertoyudan Corner. Moreover, regional government needs to facilitate costumers such as no parking charge and give the facilitation to support the activities of street vendors.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: ppknunnes@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberadaan PKL sebagai salah satu sektor informal di perkotaan menyebabkan berbagai masalah seperti kemacetan, ketertiban, kebersihan dan keindahan kota menjadi berkurang. Permasalahan berkaitan dengan keberadaan PKL juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang berusaha menertibkan PKL yang melakukan aktivitas dagang di sepanjang jalan nasional, dalam hal ini adalah PKL yang menempati Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang tahun 2013, di kabupaten Magelang terdapat 4507 PKL. Di sepanjang Jalan Raya Magelang-Yogyakarta dari Mertoyudan hingga Blondo terdapat 129 PKL (Wawancara Kasi Bimbingan Usaha Dinas Perdagangan dan Pasar kabupaten Magelang, 10 Januari 2014).

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan PKL ini, Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009, dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Implementasi dari peraturan tersebut adalah dengan melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di sepanjang Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8 dari wilayah Mertoyudan hingga Blondo dengan menyediakan tempat dan sarana yang memadai bagi PKL untuk berjualan. Pemerintah Kabupaten Magelang membangun sebuah tempat untuk merelokasi PKL yang selama ini berjualan di sepanjang Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8. Kawasan ini bernama "PKL Mertoyudan Corner".

PKL Mertoyudan Corner adalah kawasan yang dikembangkan sebagai tempat relokasi PKL yang dilengkapi dengan sarana yang representatif seperti kios, kamar mandi, mushola, listrik dan air serta parkir yang luas.

Kebijakan relokasi PKL di sepanjang Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8 ke PKL Mertoyudan Corner diharapkan mampu menjadi solusi dari berbagai masalah yang ditimbulkan PKL tanpa merugikan salah satu pihak termasuk PKL yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan sebagai PKL.

Kebijakan relokasi yang dilakukan terhadap PKL di sepanjang Jalan Raya Magelang-Yogyakarta diupayakan mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan PKL yang selama ini menyebabkan berbagai masalah. Lebih dari itu, dengan merelokasi PKL ke tempat yang lebih representatif diharapkan kondisi kesejahteraan PKL dapat ditingkatkan sekaligus dapat dijadikan sebagai kawasan kuliner Magelang. Penelitian terhadap penataan dan pemberdayaan PKL juga pernah dilakukan oleh Handoyo dengan judul "KONTRIBUSI MODAL SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASCA RELOKASI KE JALAN MENTERI SOEPENO SEMARANG". Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa relokasi yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Hasil lain adalah modal sosial, utamanya *trust and networking* berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang, yaitu terpenuhinya kebutuhan minimal pedagang yang dalam jangka panjang menjamin kelangsungan hidup pedagang. Selain itu, kualitas hidup pedagang yang berjualan di jalan Menteri Soepeno cukup baik dilihat dari aspek kesejahteraan, kebebasan yang dimiliki, serta keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan usahanya. Pedagang yang dipindahkan nyatanya dapat beradaptasi secara sosial dan ekonomi di lingkungan yang baru serta dapat menerima kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot (Handoyo, 2012: 58).

Berdasarkan pada ulasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Kualitas Hidup Sejahtera PKL di Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8 Pasca Relokasi

ke *PKL Mertoyudan Corner* ". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui respons PKL terhadap kebijakan relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner* serta menganalisis kondisi kualitas hidup sejahtera PKL pasca relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan penelitian kualitatif peneliti berupaya untuk meneliti, menjelaskan, dan mendiskripsikan kondisi kualitas hidup, kesejahteraan pedagang kaki lima di Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8 pasca relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner*. Penelitian ini berlokasi di *PKL Mertoyudan Corner*, PKL yang pindah dari *PKL Mertoyudan Corner* yang berada di sekitar Kantor Kecamatan Mertoyudan dan Kantor Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang. Data dalam penelitian kualitatif terdiri atas data primer dan data sekunder (Rachman, 2011: 201).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. Dalam penelitian ini data diperoleh dari 12 informan yaitu 9 pedagang di *PKL Mertoyudan Corner*, 2 pedagang yang pindah dari *PKL Mertoyudan Corner*, serta pihak dari Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang yang diwakili oleh Kasi Bimbingan Usaha. Data lain berasal dari buku literatur yaitu buku kecamatan Mertoyudan dalam angka, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penataan maupun pemberdayaan PKL berupa Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2009, PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sumber lainnya yaitu, arsip data PKL yang berasal dari Dinas Perdagangan dan Pasar serta Dinas Pekerjaan Umum, dokumentasi dari bagian informasi dan komunikasi kabupaten Magelang maupun penelitian terdahulu yang

berhubungan dengan penataan PKL di kabupaten Magelang.

Penelitian ini dipusatkan atau difokuskan pada (1) respons PKL di Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8 pasca relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner*, (2) kualitas hidup PKL pasca relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner*, (3) kesejahteraan PKL pasca relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner*. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari hingga Maret 2014. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan alat bantu pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap. Responden dalam penelitian ini adalah PKL di *PKL Mertoyudan Corner*, PKL yang pindah dari *PKL Mertoyudan Corner* serta Kasi Bimbingan Usaha Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang. Pengamatan atau observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tanpa peran serta. Data yang diperoleh di lapangan berupa data deskriptif seperti kondisi dan aktivitas PKL. Teknik lain yang digunakan adalah melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206). Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan, diantaranya berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penataan PKL, arsip, serta foto kegiatan PKL.

Tahap pengujian validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi dan perpanjangan pengamatan. Triangulasi adalah teknik memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007: 320). Peneliti menggunakan teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan di lapangan. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan PKL pasca relokasi dengan melakukan pengamatan kepada PKL

yang pindah dari *PKL Mertoyudan Corner*. Dengan membandingkan antara hasil wawancara dari sumber yang berbeda dengan hasil pengamatan serta melakukan perpanjangan pengamatan, peneliti memperoleh hasil yang valid sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pada tahap analisis data, setelah data penelitian terkumpul maka data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif interaktif dimana analisisnya dimulai dari tahap pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2010: 334).

PEMBAHASAN

Gambaran Singkat PKL Mertoyudan Corner

PKL Mertoyudan Corner adalah sebuah kawasan yang dikembangkan dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL di sepanjang Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8. *PKL Mertoyudan Corner* terletak di Jalan Mayjen Bambang Sugeng. Di *PKL Mertoyudan Corner* disediakan 40 kios permanen dan 28 kios tenda, selain itu tersedia juga sarana yang representatif bagi PKL seperti listrik dan air bersih, kamar mandi, mushola dan tempat parkir. Listrik dan air bersih pada 6 bulan awal diberikan secara gratis. Relokasi PKL diawali dengan kegiatan pendataan, sosialisasi relokasi, pengundian los dan yang terakhir penempatan lokasi relokasi.

PKL yang direlokasi ke *PKL Mertoyudan Corner* adalah PKL kategori kuliner yang tidak memiliki tempat parkir bagi pembeli dan diprediksi menyebabkan parkir liar dan PKL yang menempati trotoar di sepanjang koridor Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8. Relokasi PKL ke *PKL Mertoyudan Corner* dilakukan pada bulan Mei 2013 dan peresmian dilakukan pada tanggal 18 Mei 2013 oleh Bupati Magelang, Ir. Singgih Sanyoto. Dari 129 PKL yang ada di sepanjang Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8, 92 PKL masuk dalam kategori relokasi. Dari 92 PKL, 60 PKL menempati *PKL Mertoyudan Corner* dan sisanya memilih mencari atau membeli kios di tempat

lain. Bagi PKL yang berjualan nasi kucing diperbolehkan berjualan di sekitar kampung/perumahan tetapi dilarang berjualan di sepanjang koridor Jalan Raya Magelang-Yogyakarta.

Di *PKL Mertoyudan Corner* terdapat berbagai jenis makanan, mulai dari sop buah, es tape, martabak, sop iga, soto Klaten, tongseng, gulai, nasi goreng, lamongan, *seafood*, nasi rames, pecel lele dan lain-lain. Pedagang mulai berjualan pada pagi hari hingga malam hari, tidak ada batasan waktu bagi pedagang yang berjualan, namun umumnya mereka berjualan pada pagi hari hingga tengah malam.

Respons PKL Terhadap Relokasi Ke *PKL Mertoyudan Corner*

Kebijakan relokasi PKL ke *PKL Mertoyudan Corner* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL memberikan berbagai respons dari pedagang. Respons yang diberikan dapat berupa respons positif (penerimaan) ataupun respon negatif berupa penolakan dan protes. Pada prinsipnya, PKL di sepanjang Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8 memberikan respons positif terhadap relokasi yaitu berupa penerimaan. Dari 11 informan, 9 informan memberikan sikap positif terhadap relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner*.

Faktor pendorong penerimaan PKL terhadap relokasi salah satunya adalah karena alasan kemudahan yang diperoleh melalui fasilitas yang diberikan kepada PKL. Selain itu, tidak adanya pungutan retribusi turut menjadi pendorong penerimaan PKL terhadap relokasi. Alasan lain yang membuat PKL bersedia di relokasi adalah karena PKL tidak memiliki tempat berjualan lain sehingga mereka memilih pasrah menerima relokasi. Dengan kebijakan relokasi ini PKL berharap kondisi mereka akan menjadi lebih baik dibandingkan kondisi mereka ketika berjualan di pinggir jalan. PKL juga berharap agar pemerintah melakukan promosi sehingga *PKL Mertoyudan Corner* lebih dikenal dan banyak pengunjung yang datang dan penghasilan PKL meningkat.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang melalui relokasi ini dilakukan dengan bantuan berbagai pihak seperti Dinas Perdagangan dan Pasar, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pariwisata. Dalam rangka relokasi, Pemerintah Kabupaten Magelang memberikan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan selama 13 hari. Pembinaan dilakukan dengan membuka posko informasi dan keluh kesah bagi PKL, sehingga PKL dapat menyampaikan harapan mereka dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner*.

Respons PKL dalam bentuk penerimaan ini menunjukkan berlakunya teori tindakan. Penerimaan atau tindakan persetujuan yang dilakukan oleh PKL merupakan suatu keputusan untuk bertindak, sebagai hasil dari pikiran yang berorientasi pada tujuan. Seseorang akan memutuskan apa yang dilakukan sesuai dengan interpretasinya terhadap dunia sekeliling (Jones, 2010:25). Teori tersebut menunjukkan bahwa respons berupa penerimaan PKL didasari oleh tujuan agar mereka tidak digusur dan pemikiran tentang harapan di *PKL Mertoyudan Corner*

Kualitas Hidup Pkl Pasca Relokasi Ke *PKL Mertoyudan Corner*

Kebijakan relokasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL memberikan dampak terhadap kualitas hidup PKL. Kualitas hidup adalah bagaimana perasaan seseorang terhadap kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar serta kepuasan terhadap lingkungan (Warner, 2006: 5).

Yuan (dalam Sarifudin, 2011: 30) mengungkapkan bahwa kualitas hidup dibentuk oleh tiga aspek yang saling beririsan yaitu, viability (ekonomi), livability (sosial), dan sustainability (lingkungan). Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari penilaian atas kualitas hidup, artinya kesejahteraan seseorang berdampak pada kualitas hidup seseorang tetapi tidak semata menunjukkan kualitas hidup seseorang.

Penilaian terhadap kualitas hidup berdasar *Quality of Life Indicators* dilihat dari beberapa aspek yaitu pemenuhan terhadap kebutuhan pendidikan (*education*), pertumbuhan ekonomi (*growing a vibrant economy*), perlindungan terhadap alam (*natural environment*), kesejahteraan sosial dan kerukunan (*promoting social well being and harmony*), memperoleh hiburan (*recreations*), kesehatan (*health*), pemerintah yang tanggap dan peka (*responsive government*), mobilitas yang baik (*mobility*), dan keamanan (*safety*) (Warner, 2006: 5-20).

Kualitas hidup yang baik adalah ketika seseorang memiliki kemampuan untuk memenuhi sebagian besar indikator atau kebutuhan dasar sehingga mampu memaksimalkan potensinya (Warner, 2006: 269).

Aspek penilaian kualitas hidup berdasar *Quality of Life Indicators* memiliki kesamaan dengan pendapat Soemarwoto yang dibagi dalam tiga aspek yaitu derajat pemenuhan kebutuhan sebagai makhluk hayati yang bersifat mutlak karena berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang (udara bersih, air, pangan, dan kesehatan), derajat pemenuhan kebutuhan manusiawi yang bersifat relatif (rumah, pakaian, pendidikan, hiburan) dan kebebasan memilih (agama, pekerjaan atau pilihan lain) (Soemarwoto, 2009: 23).

Diukur dari derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagai makhluk hayati yang bersifat mutlak, seperti kebutuhan pangan, perlindungan kesehatan, air bersih dan udara bersih. Kualitas hidup PKL diukur dari derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagai makhluk hayati ini bersifat mutlak. Hal ini didorong oleh keinginan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya seperti kebutuhan untuk memperoleh udara dan air yang bersih, pangan, perlindungan kesehatan serta memperoleh keturunan. Dari derajat ini PKL di *PKL Mertoyudan Corner* terpengaruh oleh faktor penghasilannya. Penghasilan yang menurun menyebabkan mereka harus menyesuaikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan penghasilan mereka

sekarang ini. Banyaknya PKL yang memutuskan pindah karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup menunjukkan adanya penurunan pada derajat ini meskipun masih bisa terpenuhi.

Kesehatan PKL di *PKL Mertoyudan Corner* menunjukkan kondisi yang cukup baik. Tidak banyak pedagang yang mengeluh sakit, meskipun mereka tidak berolahraga. Pedagang mengungkapkan dengan berdagang, mengangkat barang, mencuci piring dan melayani pembeli sudah mereka anggap sebagai olahraga. Penyakit yang mereka alami seperti masuk angin atau flu disebabkan karena terlalu lelah dan berjualan hingga larut malam. Dalam keadaan ini pedagang memilih berobat ke dokter ketika mereka sakit. Selain itu, kebutuhan akan air bersih di *PKL Mertoyudan Corner* juga tercukupi, karena listrik dan air sudah disediakan.

Kriteria kedua untuk mengukur kualitas hidup pedagang adalah derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup manusiawi, meskipun kebutuhan hidup ini bersifat relatif, kebutuhan ini masih terkait dengan kriteria yang pertama dalam mengukur kualitas hidup. Semakin tinggi kemampuan seseorang dalam memenuhi derajat ini, menunjukkan kualitas hidup orang tersebut semakin tinggi. Derajat kedua ini dapat diukur dari aspek pemenuhan akan kebutuhan relatif yang mampu dipenuhi oleh pedagang seperti pendidikan, rekreasi, dan kebutuhan sandang/pakaian, dan rumah.

Ditinjau dari segi pendidikan, PKL memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masa depan anaknya. Perhatian terhadap masa depan anak-anaknya ini ditunjukkan melalui pemberian pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan ada pula perguruan tinggi. Tujuannya adalah dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik. Dalam pemenuhan akan kebutuhan pendidikan, PKL menyesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi yang dimiliki, bahkan mengandalkan beasiswa agar pendidikan anaknya berlanjut hingga perguruan tinggi. Jika sebelum direlokasi penghasilan PKL cukup untuk membiayai sekolah, saat ini dengan penghasilan yang

menurun beberapa PKL mengandalkan beasiswa untuk menunjang pendidikan anaknya, terutama yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pada aspek ini terlihat adanya penurunan derajat.

Faktor lain seperti sandang/pakaian juga masih mampu dipenuhi oleh PKL. PKL mampu membeli pakaian layak pakai untuk melindungi badan dari paparan sinar matahari dan hujan, sesuai dengan kebutuhan keluarga. Hal tersebut dilakukan jika kondisi ekonomi PKL memungkinkan. Kebutuhan akan tempat tinggal terpenuhi meskipun kondisinya sederhana, baik rumah pribadi atau mengontrak. Umumnya PKL memiliki rumah pribadi sebagai tempat beristirahat dan berlindung.

Kebutuhan lain yang tidak kalah penting adalah hiburan. Kebutuhan rekreasi/hiburan penting sebagai manusia dan berpengaruh terhadap kualitas hidupnya. PKL umumnya memilih untuk memperoleh hiburan dengan cara yang sederhana seperti berkumpul dengan keluarga, memasak, ataupun melihat televisi. Hiburan yang mereka nikmati adalah hiburan sederhana yang tidak membutuhkan biaya yang banyak. Penghasilan yang menurun menjadi salah satu faktor PKL untuk tidak lagi menikmati hiburan seperti rekreasi ke pantai atau ke tempat lain yang membutuhkan dana lebih. Mereka lebih memilih untuk menikmati hiburan sederhana dan gratis di rumah. Jika sebelum relokasi beberapa PKL bisa berlibur 2-3 minggu sekali, kini tidak ada patokan waktu untuk berlibur karena semua disesuaikan dengan penghasilan mereka. Penilaian terhadap aspek ini menunjukkan bahwa kualitas hidup PKL mengalami penurunan.

Kriteria ketiga dalam mengukur kualitas hidup adalah melalui derajat kebebasan untuk memilih. Aspek ini dapat dilihat dari kebebasan PKL dalam bekerja dan beraktifitas maupun kondisi kenyamanan PKL setelah adanya relokasi. Dilihat dari kebebasan PKL setelah relokasi, PKL memperoleh kebebasan utamanya terbebas dari penggusuran atau penertiban. PKL juga memperoleh kebebasan dari aspek waktu untuk berjualan, bahkan jika mampu, mereka diperbolehkan berjualan selama 24 jam.

Kebebasan ini juga termasuk dalam kebebasan bekerja. Dengan kondisi *PKL Mertoyudan Corner* yang kian sepi, PKL lebih memilih untuk pindah dari *PKL Mertoyudan Corner* dan mencari lokasi yang lebih menguntungkan untuk berjualan. Kebebasan yang diterima PKL akan berdampak pada kenyamanan mereka dalam bekerja.

Faktor kenyamanan tidak dapat dilepaskan dari pengukuran terhadap kualitas hidup seseorang. Di *PKL Mertoyudan Corner*, awalnya PKL merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan, namun kenyamanan fisik tersebut tidak dibarengi dengan kenyamanan dari segi ekonomi. Penghasilan PKL yang menurun mempengaruhi kenyamanan PKL dalam berjualan. Indikasi dari ketidaknyamanan PKL dapat dilihat dari banyaknya PKL yang merasa tidak betah dan memutuskan untuk pindah dari *PKL Mertoyudan Corner*.

Kualitas hidup bersifat subjektif dan relatif, maka antar individu satu dengan lainnya memiliki pandangan yang berbeda, namun dengan tiga kriteria di atas paling tidak mampu menjadi patokan dalam mengukur kualitas hidup PKL pasca relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner*. Dari penilaian terhadap derajat terpenuhinya aspek kualitas hidup, secara umum kualitas hidup PKL tergolong menurun. Mereka masih dapat memenuhi, namun dalam kondisi yang terbatas dan golongan kualitas hidup sederhana, dibandingkan ketika mereka berjualan di lokasi lama mereka.

Penilaian terhadap kualitas hidup adalah bagaimana perasaan terhadap kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar serta kepuasan terhadap lingkungan (Warner, 2006: 5). Selain itu, pandangan Calman melalui teori "Calman Gap" (dalam Silitonga, 2007: 5) menyatakan bahwa kualitas hidup adalah bagaimana perbedaan antara keinginan yang ada dibandingkan dengan keadaan yang ada sekarang. Jika perbedaan antara kedua keadaan ini lebar, ketidakcocokan ini menunjukkan kualitas hidup seseorang tersebut rendah. Fakta ini terlihat dari keadaan PKL pasca relokasi. Keinginan PKL pasca relokasi adalah memperoleh penghasilan dan kondisi yang lebih baik sehingga meningkatkan kesejahteraannya,

namun kenyataannya kondisi mereka menunjukkan penurunan dari segi ekonomi. Perbedaan yang cukup lebar ini menunjukkan bahwa kualitas hidup PKL diukur melalui teori Calman's Gap mengalami penurunan.

Kesejahteraan PKL Pasca Relokasi

Penilaian terhadap kualitas hidup seseorang tidak lepas dari kondisi kesejahteraannya. Kesejahteraan PKL pasca relokasi berpengaruh pada kualitas hidup PKL. Kesejahteraan dalam penelitian ini diukur melalui aspek pemenuhan kebutuhan material spiritual dan sosial (Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Penilaian terhadap kesejahteraan ditekankan pada aspek penghasilan dan pemenuhan kebutuhan material.

Pada kenyataannya pasca relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner*, penghasilan PKL mengalami penurunan yang disebabkan jumlah pengunjung yang sedikit. Penurunan penghasilan ini memberi dampak pada pemenuhan kebutuhan material, sosial dan spiritualnya. Pedagang harus menyesuaikan diri agar mampu memenuhi semua kebutuhan dengan penghasilan yang menurun. Dari 11 pedagang, 9 pedagang mengalami penurunan penghasilan dan hanya 2 pedagang yang penghasilannya stabil atau meningkat.

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur pada aspek material saja, namun banyak pendapat menyatakan bahwa dimensi ekonomi memegang peranan penting karena dapat menjadi sarana dan pendorong bagi pemenuhan kebutuhan pada dimensi atau aspek lain. Apabila pendapat tersebut diikuti, dapat dipahami bahwa prasarat utama agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dalam berbagai dimensi adalah peningkatan penghasilan. Kesejahteraan masyarakat dapat dianggap meningkat apabila masyarakat semakin mampu untuk memenuhi kebutuhannya atau semakin banyak kebutuhan hidupnya yang dapat dipenuhi (Soetomo dalam utami, 2013: 132).

Penilaian terhadap kesejahteraan selain ditinjau dari segi penghasilan juga ditinjau dari

aspek pemenuhan terhadap kebutuhan material. Dari segi material seperti kebutuhan makan dan minum, pendidikan, dan tempat tinggal, PKL mampu memenuhi kebutuhan makan dan minum namun kondisinya tergolong sederhana hal ini disebabkan karena penghasilan PKL menurun. Kini pasca relokasi dan mengalami penurunan penghasilan, demi memenuhi kebutuhan pendidikan, PKL bergantung pada beasiswa utamanya yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kondisi ekonomi yang menurun ini membuat PKL tak dapat menyisihkan uangnya untuk ditabung.

Pada aspek sosial, terjalin kerukunan antar pedagang di *PKL Mertoyudan Corner*. Kondisi paguyuban dan arisan sebagai salah satu ajang sosialisasi kini tidak aktif. Hal ini disebabkan karena banyak PKL yang pindah dari *PKL Mertoyudan Corner* demi memenuhi semua kebutuhan. Saat ini hanya ada 36 pedagang yang aktif berdagang, 24 atau 40% diantara 60 PKL yang direlokasi memutuskan pindah dari *PKL Mertoyudan Corner*. Kemudahan yang diberikan melalui fasilitas yang ada nyatanya tidak memberikan peningkatan dari segi ekonomi.

Kebutuhan lain yang penting bagi manusia adalah pemenuhan kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual ini meliputi perasaan aman, tenang dan menikmati hiburan. Pasca relokasi, PKL mendapatkan rasa aman dan tenang dari penggusuran tetapi tidak aman dan tenang dari segi ekonomi. Hal tersebut menyebabkan tingkat kenyamanan PKL berkurang. Dengan penghasilan yang menurun, kini sebagian besar PKL tak dapat menikmati hiburan seperti sebelum relokasi. Hiburan yang mereka nikmati adalah hiburan gratis atau yang rendah ongkos. Ditinjau dari penilaian terhadap penghasilan, pemenuhan terhadap kebutuhan material, sosial dan spiritual, pada prinsipnya kesejahteraan PKL pasca relokasi mengalami penurunan.

Pendapat Midgley, et al (dalam Suharto, 2006: 3) menjadi salah satu teori yang memperkuat penelitian mengenai kondisi kesejahteraan PKL pasca relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner*. Menurutnya, kondisi sejahtera atau *well being* terjadi manakala

kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan penghasilan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Faktanya kondisi PKL pasca relokasi ke *PKL Mertoyudan Corner* menunjukkan penurunan dari beberapa aspek yang dinyatakan oleh Midgley di atas, seperti penurunan penghasilan dan ketergantungan terhadap beasiswa guna mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi.

Kebijakan sosial yang diwujudkan melalui berbagai peraturan daerah dan program yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak selalu berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Timtus (dalam Huda, 2009: 88) menyatakan bahwa kebijakan sosial juga dapat mengakibatkan kondisi ketidaksejahteraan yang dia sebut dengan kondisi *illfare*. Kondisi ini nyatanya terbukti melalui kebijakan relokasi yang dilakukan kepada PKL di sepanjang Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8. Kesejahteraan yang menurun pasca relokasi menunjukkan bahwa suatu kebijakan tidak selalu membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, (1) PKL di Jalan Raya Magelang-Yogyakarta KM 5-8 sebagian besar menunjukkan respons yang positif terhadap kebijakan relokasi, yaitu dalam bentuk persetujuan atau penerimaan, sedangkan 24 PKL atau 40% di antara PKL yang direlokasi memutuskan pindah dari *PKL Mertoyudan Corner* ke tempat lain karena mengalami penurunan penghasilan, (2) Kualitas hidup sejahtera PKL pasca relokasi yang diukur dari aspek penghasilan, pemenuhan kebutuhan material, derajat dipenuhinya kebutuhan sebagai makhluk hayati, derajat dipenuhinya kebutuhan manusiawi, kebebasan untuk memilih dan kenyamanan menunjukkan bahwa kualitas hidup sejahtera PKL pasca relokasi mengalami penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Handoyo, Eko. 2012. *"Kontribusi Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi Ke jalan Menteri Soepeno Semarang"*. Laporan Penelitian: UNNES
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jones, Pip. 2010. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rachman, Maman. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: Unnes Press.
- Sarifudin dan Retno, Susanti. *"Penilaian Kesejahteraan Masyarakat untuk Mendukung Permukiman Berkelanjutan di Kelurahan Terboyo Wetan, Semarang"*. *Makara Sosial Humaniora Vol 15 No 1: UNDIP*.
- Soemarwoto, Otto. 2009. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. "Welfare State Depsos". *Makalah Seminar Negara Kesejahteraan*: Yogyakarta.
- Utami, Rachmatun. 2013. *"Kebijakan Pemkot Surakarta dalam Menata PKL di Laweyan"*. Skripsi: UNNES
- Warner, J Benjamin. 2006. *"Community Quality Of Life Indicators"*. *Social Indicators Research Series Vol 28*: Springer.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial